

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOVERNANCE DI NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG: PELAJARAN DAN BEST PRACTICES

Tomi Satri Maggara¹

tommysatriamaggara@gmail.com¹

M. Fachri Adnan²

fachri.adnan@gmail.com²

Afriva Khaidir³

af.khaidir@fis.unp³

^{1,2,3}Universitas Negeri Padang

ABSTRACT

This research investigates the application of governance principles in developed and developing countries, with a focus on the lessons that can be learned from the experience of developed countries and the implications for developing countries. Qualitative methods are used to analyze the political, economic and social context that influences the implementation of governance principles. The results show that despite significant differences in the challenges faced, there are many best practices that developing countries can adopt to improve their governance. Through commitment, cooperation and continuous learning, developed and developing countries can work together to achieve better development goals.

Keywords: *Governance Principles, Developed and Developing Countries, Best Practice.*

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki penerapan prinsip-prinsip governance di negara maju dan berkembang, dengan fokus pada pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman negara maju dan implikasinya bagi negara-negara berkembang. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis konteks politik, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi implementasi prinsip-prinsip governance. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan signifikan dalam tantangan yang dihadapi, ada banyak praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh negara-negara berkembang untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan mereka. Melalui komitmen, kerjasama, dan pembelajaran yang berkelanjutan, negara-negara maju dan berkembang dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Kata Kunci: Prinsip Governance, Negara Maju dan Berkembang, Best Practice.

PENDAHULUAN

Penerapan prinsip-prinsip governance telah menjadi perhatian utama bagi negara-negara maju dan berkembang dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Di era globalisasi ini, di mana tantangan dan peluang berdampak pada skala global, prinsip-prinsip governance menjadi semakin penting dalam menavigasi dinamika kompleks politik, ekonomi, dan sosial. Sebagai landasan bagi tata kelola yang baik, prinsip-prinsip governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum telah menjadi fokus reformasi di banyak negara.

Negara maju, dengan sistem pemerintahan yang matang dan sumber daya yang cukup, telah menjadi pionir dalam menerapkan prinsip-prinsip governance. Mereka telah membangun struktur pemerintahan yang efektif, menjalankan program-program transparansi, dan memperkuat lembaga-lembaga pengawasan untuk memastikan akuntabilitas dan responsivitas. Namun, tantangan tetap ada, termasuk dalam menghadapi masalah kompleks seperti korupsi, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan sosial yang semakin merajalela.

Sementara itu, negara berkembang menghadapi tantangan yang berbeda dalam menerapkan prinsip-prinsip governance. Meskipun banyak negara berkembang telah melakukan reformasi governance yang signifikan, seperti

meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, mengurangi birokrasi, dan memperkuat peran masyarakat sipil, tantangan besar masih dihadapi dalam memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan, menangani korupsi, dan memberikan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Dalam konteks global yang semakin terhubung, perbandingan antara penerapan prinsip-prinsip governance di negara maju dan berkembang memberikan wawasan yang berharga bagi upaya reformasi dan pembangunan di seluruh dunia. Melalui pembelajaran dan pertukaran pengalaman, negara-negara dapat mengidentifikasi best practices, menerapkan strategi yang tepat, dan memperkuat kerjasama internasional untuk memajukan tata kelola yang baik.

Perbedaan kondisi dan konteks antara negara maju dan berkembang memunculkan dinamika yang beragam dalam penerapan prinsip-prinsip governance. Di negara maju, prinsip-prinsip governance telah menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan lembaga-lembaga yang mapan dan mekanisme pengawasan yang kuat. Namun, hal ini tidak selalu berarti bahwa mereka terbebas dari masalah; bahkan, negara maju sering kali dihadapkan pada tantangan dalam memastikan akuntabilitas yang tepat

dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Di sisi lain, negara berkembang sering menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip governance. Faktor-faktor seperti korupsi, ketidakstabilan politik, dan keterbatasan infrastruktur sering menjadi hambatan bagi upaya reformasi governance. Namun, banyak negara berkembang juga telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan mereka melalui inisiatif-inisiatif seperti reformasi hukum, peningkatan transparansi, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

Perbandingan antara negara maju dan berkembang dalam hal penerapan prinsip-prinsip governance dapat memberikan wawasan yang berharga bagi upaya pemahaman dan pemecahan masalah terkait tata kelola yang baik. Melalui analisis komparatif, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi prinsip-prinsip governance di berbagai konteks, serta mengeksplorasi strategi terbaik untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya peningkatan konektivitas dan interdependensi global, penting bagi negara-negara maju dan berkembang untuk terus berkolaborasi dan bertukar informasi tentang praktik-praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan. Inisiatif

seperti forum internasional, program bantuan pembangunan, dan kemitraan lintas sektor dapat menjadi platform yang efektif untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam hal penerapan prinsip-prinsip governance.

Oleh karena itu, melalui artikel ini, kami bertujuan untuk mendukung dialog global tentang pentingnya prinsip-prinsip governance dalam pembangunan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata dalam membentuk kebijakan dan praktik-praktik yang lebih baik di berbagai tingkat pemerintahan. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama memperkuat fondasi tata kelola yang baik dan mendorong kemajuan yang lebih besar bagi masyarakat global secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menjelajahi penerapan prinsip-prinsip governance di negara maju dan berkembang. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan kita untuk memahami konteks dan kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi implementasi prinsip-prinsip governance dengan lebih mendalam. Melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan studi kasus, kami berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan, strategi, dan dampak dari penerapan

prinsip-prinsip governance di berbagai konteks nasional.

Metode deskriptif dipilih untuk memberikan gambaran yang akurat dan detail tentang situasi aktual di lapangan. Kami akan mengumpulkan data yang mendalam tentang pengalaman praktis pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dengan implementasi prinsip-prinsip governance. Dengan demikian, kami berharap dapat menyajikan analisis yang berbasis bukti dan relevan bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti dalam mendukung pengembangan tata kelola yang lebih baik di negara maju maupun berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Konteks Politik, Ekonomi, Dan Sosial Antara Negara Maju Dan Berkembang Memengaruhi Penerapan Prinsip-Prinsip Governance

Perbedaan konteks politik, ekonomi, dan sosial antara negara maju dan berkembang memiliki dampak signifikan pada penerapan prinsip-prinsip governance. Secara politik, negara maju sering memiliki struktur politik yang lebih stabil dan mapan, dengan institusi-institusi demokratis yang kuat dan sistem hukum yang berfungsi baik. Di sisi lain, negara berkembang mungkin menghadapi tantangan dalam hal stabilitas politik, korupsi, dan kelemahan dalam sistem hukum, yang semuanya dapat mempengaruhi kemampuan mereka

untuk menerapkan prinsip-prinsip governance dengan efektif.

Dari segi ekonomi, negara maju cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dan pendapatan nasional yang tinggi, yang memungkinkan mereka untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Di sisi lain, negara berkembang sering menghadapi kendala dalam hal keterbatasan sumber daya finansial, ketidaksetaraan ekonomi, dan ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi tertentu, yang semuanya dapat membatasi kemampuan mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip governance secara efektif.

Secara sosial, perbedaan dalam struktur demografi, tingkat pendidikan, dan keberagaman budaya juga memainkan peran penting dalam penerapan prinsip-prinsip governance. Negara maju mungkin memiliki masyarakat yang lebih teredukasi, inklusif, dan terlibat dalam proses politik, yang dapat mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip governance yang lebih transparan dan partisipatif. Di sisi lain, negara berkembang sering menghadapi tantangan dalam hal ketidaksetaraan sosial, akses terhadap pendidikan dan informasi, dan konflik antar etnis atau agama, yang semuanya dapat menghambat upaya mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip governance yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun demikian, perbedaan dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial tidak selalu berarti bahwa negara-negara berkembang tidak dapat menerapkan prinsip-prinsip *governance* yang efektif. Sebaliknya, mereka memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan konteks lokal mereka, dengan memperhitungkan tantangan yang mereka hadapi dan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya yang ada. Dengan demikian, penting untuk memahami dinamika yang kompleks ini dalam upaya untuk mempromosikan tata kelola yang baik di seluruh dunia.

2. Tantangan Utama Yang Dihadapi Oleh Negara Maju Dan Berkembang Dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Governance

Tantangan yang dihadapi oleh negara maju dan berkembang dalam menerapkan prinsip-prinsip *governance* sangatlah beragam dan kompleks. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah korupsi yang meluas di berbagai tingkat pemerintahan. Korupsi tidak hanya merugikan perekonomian negara dengan mengalirkan dana publik ke kantong pribadi, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Di negara berkembang, korupsi sering kali menjadi hambatan besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial.

Selain korupsi, kekurangan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai sering kali menjadi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip *governance*. Di negara berkembang, infrastruktur yang kurang memadai dapat menghambat upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Keterbatasan sumber daya manusia juga dapat menghambat kemampuan negara dalam mengelola dan melaksanakan kebijakan secara efektif.

Negara-negara maju dan berkembang juga dihadapkan pada tantangan politik dan sosial yang kompleks. Perubahan politik yang tidak stabil dan ketidakpastian kebijakan sering kali menghambat implementasi prinsip-prinsip *governance* yang konsisten. Selain itu, ketegangan sosial dan ketimpangan ekonomi juga dapat mempersulit upaya untuk menciptakan tata kelola yang inklusif dan berkeadilan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, negara-negara maju dan berkembang telah mengadopsi berbagai strategi dan pendekatan. Beberapa negara maju telah berhasil mengimplementasikan reformasi hukum dan kelembagaan yang kuat untuk memerangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Mereka juga telah melakukan investasi yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk

memperkuat kapasitas administratif mereka.

Di sisi lain, negara-negara berkembang sering mengandalkan inisiatif internasional dan bantuan pembangunan untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Mereka juga telah melakukan reformasi politik dan ekonomi untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan-tantangan yang kompleks ini membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait.

3. Praktik terbaik yang dapat dieksplorasi dan diadopsi oleh negara-negara berkembang berdasarkan pengalaman negara maju dalam menerapkan prinsip-prinsip governance

Praktik-praktik terbaik yang dapat dieksplorasi dan diadopsi oleh negara-negara berkembang berdasarkan pengalaman negara maju dalam menerapkan prinsip-prinsip governance yang efektif meliputi sejumlah strategi yang dapat menjadi landasan bagi reformasi dan peningkatan kinerja pemerintahan. Pertama-tama, negara-negara berkembang dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dengan mendorong akses publik yang lebih luas terhadap informasi dan memperkuat

lembaga-lembaga pengawasan independen.

Selanjutnya, negara-negara berkembang dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam memperkuat supremasi hukum dan penegakan hukum yang efektif. Ini meliputi memperkuat independensi sistem peradilan, memastikan kepatuhan terhadap standar hukum internasional, dan memperkuat mekanisme perlindungan hak asasi manusia. Dengan memperkuat supremasi hukum, negara-negara berkembang dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan dapat diprediksi untuk investasi dan pembangunan.

Selain itu, negara-negara berkembang dapat belajar dari praktik terbaik dalam membangun kapasitas institusional yang kuat. Ini termasuk investasi dalam pelatihan dan pengembangan pegawai negeri, memperkuat lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab, dan meningkatkan efisiensi administrasi publik. Dengan membangun kapasitas institusional yang kuat, negara-negara berkembang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif.

Selanjutnya, negara-negara berkembang dapat mengeksplorasi praktik-praktik terbaik dalam mempromosikan partisipasi masyarakat sipil yang lebih luas dalam proses pembuatan keputusan. Ini melibatkan

pembangunan mekanisme konsultasi dan dialog yang inklusif antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta memperkuat kapasitas organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Selain itu, negara-negara berkembang juga dapat memperkuat kerjasama regional dan internasional dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan. Ini termasuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, membangun jaringan kerjasama, dan menyelenggarakan pertukaran pengalaman antar negara dalam hal penerapan prinsip-prinsip governance yang efektif.

Dengan menerapkan praktik-praktik terbaik ini, negara-negara berkembang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan mereka, meningkatkan kinerja pemerintahan, dan mempercepat pembangunan berkelanjutan. Ini akan membantu negara-negara tersebut mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, penting untuk diakui bahwa penerapan prinsip-prinsip governance merupakan elemen kunci dalam upaya memperbaiki kinerja pemerintahan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di negara maju maupun berkembang.

Meskipun ada perbedaan dalam konteks dan tantangan yang dihadapi oleh kedua kelompok negara ini, ada banyak pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman negara maju yang dapat berguna bagi negara-negara berkembang.

Kita melihat bahwa langkah-langkah untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan partisipasi masyarakat sipil merupakan inti dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di kedua jenis negara ini. Selain itu, membangun kapasitas institusional yang kuat dan meningkatkan kerjasama internasional juga merupakan faktor penting dalam memajukan prinsip-prinsip governance yang efektif.

Dengan demikian, sementara ada tantangan yang besar yang harus diatasi, ada juga banyak kesempatan untuk perbaikan dan inovasi dalam menerapkan prinsip-prinsip governance di berbagai konteks nasional. Dengan komitmen yang tepat, kerjasama yang kuat, dan pembelajaran yang berkelanjutan, negara maju dan berkembang dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Saran

Untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip governance di negara maju dan berkembang, beberapa saran dapat dipertimbangkan:

Penguatan Kapasitas: Negara-negara berkembang perlu terus berinvestasi dalam pembangunan kapasitas institusional, termasuk pelatihan dan pengembangan pegawai negeri, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan layanan publik.

- 1) Peningkatan Transparansi: Langkah-langkah tambahan harus diambil untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, seperti mendorong publikasi informasi yang lebih banyak dan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap data dan kebijakan publik.
- 2) Penguatan Sistem Hukum: Negara-negara berkembang perlu memperkuat supremasi hukum dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- 3) Promosi Partisipasi Masyarakat Sipil: Langkah-langkah harus diambil untuk memperkuat peran dan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam proses pembuatan keputusan, termasuk memfasilitasi dialog dan konsultasi yang lebih inklusif antara pemerintah dan masyarakat sipil.
- 4) Kerjasama Internasional: Negara-negara berkembang dapat memperkuat kerjasama regional

dan internasional untuk bertukar pengalaman, belajar dari praktik-praktik terbaik, dan mendapatkan dukungan teknis dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, LR (2017). Evolusi konsep tata kelola pemerintah: Sound governance, dynamic governance dan open government. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, dprexternal3.dpr.go.id, <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/867>
- Haryanto, V (2017). Subjek Petani dalam Wacana Pembangunan di Manggarai. *Journal of Governance*, jurnal.untirta.ac.id, <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jog/article/view/2122>
- Hastiyanto, F (2018). Kritik Epistemologis Paradigma Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik Volume 9, Nomor 1 ...*, eprints.untirta.ac.id, <https://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1342>
- Jaswadi, J (2016). Analisis tingkat implementasi good corporate governance pada usaha kecil dan menengah. *Jurnal Siasat Bisnis*, search.proquest.com, <https://search.proquest.com/openview/14c555ba9aa118e6138615e6fe8739ab/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4665246>
- Kusuma, BMA (2016). RESENSI BUKU-ISLAMIC PERSPECTIVE ON

- MANAGEMENT: CONTEMPORARY ISSUES. *Jurnal Manajemen Dakwah*, digilib.uin-suka.ac.id, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29301/>
- Mandasari, N (2023). Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, dan Open Government. *Ebisma (Economics, Business, Management, & ...)*, journal.ebisma.net, <https://journal.ebisma.net/index.php/ojs/article/view/26>
- Mutmainna, M, Burhanuddin, B, & ... (2018). Partisipasi Governance Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. *Kolaborasi: Jurnal ...*, journal.unismuh.ac.id, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/1430>
- Nursalim, N (2021). Strategi Penguatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Daerah Pasca Pandemi Covid-19. *Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang*, jurnal2.untagsmg.ac.id, <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/558>
- Priyono, S (2019). KONSEP DAN IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan ...*, jurnal.staialhidayahbogor.ac.id, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/553>
- Soejono, F (2010). Pengaruh tipe kepemilikan terhadap profitabilitas perusahaan: Studi empiris di Bursa Efek Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, ejournal.stiesia.ac.id, <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/277>
- Suyatna, U (2009). KONDISI EMPIRIS DAN TANTANGAN ADMINISTRASI NEGARA. *Sosiohumaniora*
- Wibowo, E (2010). Implementasi good corporate governance di Indonesia. *Jurnal ekonomi dan Kewirausahaan*, ejurnal.unisri.ac.id, <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/360>